

**E-MONEV DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI
(STUDI E-MONEV KEUANGAN KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI
BALI DALAM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI)**

Muhammad Ali Azhar^{1*}

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Sudirman Campus,
Denpasar, Bali – Indonesia, 80232

*Corresponding author: aliazhar23mr@yahoo.co.id

Abstrak

Realitas umum yang terjadi dalam sistem pelaporan keuangan di Kabupaten Karangasem sebelum e-monev dipraktekan adalah prosesnya sangat lambat, rumit, dan sangat berbelit-belit, bahkan tidak jarang sangat melelahkan. Laporan yang seharusnya dapat dilakukan satu hari bisa saja menghabiskan waktu selama satu minggu dua minggu atau bahkan satu bulan. Untuk memperlancar proses pelaporan atau pemantauan tersebut, maka dilakukan upaya Reformasi Birokrasi (RB) dengan mengembangkan sistem dan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-Monev.

Tujuan dari tulisan ini pertama, melihat pelaksanaan e-monev keuangan Kabupaten Karangasem provinsi Bali dalam bingkai Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, melihat sejauhmana pelaksanaan e-monev keuangan Kabupaten Karangasem memberi dampak positif pada upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) bagi setiap OPD atau organisasi perangkat pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur yang dilakukan dengan beberapa *key informan* dari sejumlah OPD dan anggota masyarakat Kabupaten Karangasem serta menggunakan pengamatan dokumen dan observasi data di lapangan.

Temuan penelitian menyatakan, bahwa e-monev keuangan Karangasem memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kinerja birokrasi. E-monev memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten (Baplitbangda) untuk mengendalikan program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan. E-monev mempermudah untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dari yang dulu dilakukan secara manual dengan e-monev menjadi lebih cepat dilaksanakan dan hasilnya bisa kelihatan langsung secara *real time*.

Kata-kata kunci : e-monev, reformasi birokrasi, dan organisasi perangkat daerah

1. PENDAHULUAN

Keseriusan pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan reformasi birokrasi bukan setengah-setengah. Kesungguhan tersebut semakin bertambah setelah semangat *e-governance* dipromosikan menjadi salah satu upaya reformasi birokrasi. Realitas ini menjadi semangat bagi pemerintah Kabupaten Karangasem yang mulai memperkenalkan e-monev kepada setiap SKPD pemerintahan pada tahun 2015 dan dilaksanakan pada tahun 2016. E-monev sendiri sebenarnya merupakan aplikasi dari pemerintah pusat (Bappenas) yang diadopsi untuk dimanfaatkan ke semua lingkungan perangkat pemerintahannya.

Alasan utama pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem ini kedalam perangkat pemerintah daerah salah satunya adalah kesulitan dalam sistem pelaporan keuangan masing-

masing OPD. Kesan rumit dan berbelit-belit, lamban, mahal, dan melelahkan dirasakan betul di tingkat pimpinan OPD birokrasi di pemerintahan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan informasi yang diakses melalui website melalui Diskominfo 2018, pemerintah Kabupaten Karangasem, memiliki 38 organisasi perangkat daerah atau (OPD) yang terdiri dari 21 Dinas, enam Badan, dan 9 Kantor camat dan 3 kantor lurah. Ternyata, tidak satupun terhindar dari kesan negatif di atas. Alasan persoalan waktu, keterlambatan berbelit-belitnya laporan menjadi pemandangan yang lazim terjadi.

Merasa tertarik dengan program ini Pemkab kemudian mulai memanfaatkan atau menggunakan aplikasi e-monev ini ke masing-masing OPD-nya. Tujuan satu-satunya adalah memperlancar proses pelaporan/pemantauan teradap realisasi penyerapan dana dan realisasi pencapaian target yang telah berjalan.

Bulan Maret 2016 merupakan tahun pertama program ini dimulai dilaksanakan. Pada tahun tersebut, Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang memberanikan diri mengadopsi aplikasi e-monev ini dilaksanakan di lingkup pemerintahan. Keberanian ini dianggap sebagai sebuah terobosan inovasi dengan tujuan membantu proses monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan yang berbasis teknologi informasi. Dengan mengembangkan suatu sistem aplikasi Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang disebut e-monev ini, maka bisa menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya pemkab ini sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan data informasi yang cepat dan akurat khususnya dalam hal membantu proses laporan dan pemantauan capaian hasil pembangunan dan realisasi anggaran. Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ikut mengontrol kinerja lembaga/OPD di bawah pemda setempat.

Dalam pandangan reformasi birokrasi (RB) dengan adanya e-monev ini pihak pemkab berhasil memperpendek jalur birokrasi, karena dengan program ini masyarakat cukup membuka website resmi pemda Karangasem, disitu akan muncul e-monev. Tinggal klik saja, maka progress capaian kinerja seluruh unit kerja akan terlihat jelas.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber datanya secara langsung dan data yang dikumpulkan dari pihak lain secara tidak langsung. Informan dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode wawancara terstruktur. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis interaktif dilakukan dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyajian hasil ditampilkan dalam bentuk tulisan/teks (naratif) dan tambahan data berupa tabel dan gambar.

Pengumpulan data melalui teknik wawancara, dengan para *key informant*, dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan dua pengelompokan yakni jenis jabatan narasumber dan jenis data yang akan dieksplorasi.

Adapun beberapa *key informant* tersebut, pertama, Ketua Bappeda Pemkab, atau yang saat ini sering disebut Baplitbangda. Sebagai ketua Baplitbangda tentu sangat beralasan untuk mengeksplorasi alasan dibalik pelaksanaan E-monev di Kabupaten Karangasem. Baplitbangda adalah *leading sector* pelaksanaan aplikasi ini.

Kedua, Ketua, dan para Kepala Dinas seluruh Kabupaten Karangasem. Sebagai obyek dari pelaksanaan aplikasi ini tentunya sangat penting mencari data dalam penelitian ini tentang tanggapan pelaksanaan aplikasi E-monev kepada ketua dan para Kepala Dinas perangkat organisasi pemerintahan yang dipimpinnya.

Ketiga, lima belas (15) kepala satuan kerja di tingkat perangkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Sebagai perangkat kerja dibawah OPD, kepala satuan kerja merupakan obyek langsung dari pelaksanaan aplikasi ini. Jenis data yang akan dieksplorasi dalam dengan lima belas kepala satuan kerja tersebut mengenai efektifitas kerja dan kinerja pegawai dan birokrasi di lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Keempat, teknisi dan operator aplikasi program masing-masing OPD se-Kabupaten Karangasem, alasan dibalik pemilihan para teknisi tersebut, karena mereka adalah operator pelaksana dari aplikasi ini. Jenis data yang dieksplorasi dari mereka adalah Kepercayaan kepada aplikasi ini dan manfaat langsung yang diperoleh setelah pelaksanaan e-monev.

Terakhir, kelima, masyarakat yang mengakses aplikasi mengontrol kinerja lembaga/OPD di bawah pemda setempat. Alasan dibalik pemilihan informan kepada kelompok masyarakat pengguna ini adalah, ingin melihat kemudahan akses yang diperoleh oleh masyarakat, penilaian masyarakat terhadap OPD setelah pelaksanaan aplikasi (e-monev) dan apa yang akan dilakukan setelah OPD pasca pelaksanaan e-monev.

Konsep E-Monev

E-monev diawali dari tuntutan agar penyelenggara pemerintah melaksanakan pemerintahan melalui ruang lingkup elektronik atau *e-government*. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan e-government sejak tahun 2003 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Ini merupakan payung hukum dari langkah pertama pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis elektronik. Payung hukum ini mengatur sistem informasi pemerintahan elektronik (*e-government*) untuk mengikat komitmen dari setiap aparatur negara.

Djunaidi (2015), E-government didalamnya mencakup G2G (government to government), G2B (government to business), dan G2C (government to citizen), G2E (government to employee) dan C2G (citizen to government). Berikut ini dua pengertian e-Government : (1). *E-government consists of the digital interactions between a government and citizens, government and businesses/commerce, government and employees, and also between government and government/agencies*; (2). *E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government*.

Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa layanan publik dapat didukung dengan aplikasi teknologi informasi dengan tujuan agar layanan yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien dilihat dari sisi biaya yang harus dikeluarkan maupun waktu serta kecepatan layanan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kewajiban mengikat komitmen setiap aparatur negara dengan *e-government* mengharuskan setiap lembaga atau kementerian sampai ke tingkat pemerintahan daerah untuk memiliki sistem informasi (TI) dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Dengan kewajiban seperti itu, diwajibkan setiap lembaga atau kementerian K/L sampai pemerintahan daerah memiliki sistem informasi yang berbeda-beda

dengan tujuan yang sama yakni untuk manajemen anggaran, program kerja, dan administrasi kepegawaian.

Bappenas merupakan lembaga/institusi pemerintah yang menangkap peluang ini dengan mencoba membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan tuntutan e-government. Aplikasi ini dikenal dengan istilah e-monev Bappenas. *E-monev* merupakan barang (aplikasi) baru bagi dunia birokrasi, alasannya, belum banyak perangkat pemerintahan di daerah yang mencoba melakukan ide ini. Menurut Bappenas e-monev baru dapat dilakukan oleh pemerintah Pusat, yaitu Kementerian/ Lembaga (K/L) saja. e-monev akan dikembangkan sehingga dapat juga bermanfaat dan digunakan oleh Bappeda dan SKPD pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga aplikasi ini dari e-monev Bappenas, di tingkat daerah aplikasi ini sering disebut dengan e-monev Bappeda.

E-monev Bappeda berfungsi untuk memantau serapan anggaran Pemda secara konsisten, efektif dan akurat. E-monev Bappeda mengakomodir monitoring dan evaluasi untuk dana APBD, DAK, DEKON, TP dan Urusan Bersama. Selain itu E-monev Bappeda juga memiliki fitur guna mengelola kunjungan-kunjungan Bappeda dalam rangka MONEV yang disimpan dan dapat dicetak menjadi laporan Rekam Jejak Bappeda. E-monev Bappeda efektif karena dirancang dengan baik menggunakan teknologi yang unggul dengan desain arsitektur yang tepat guna. Tidak membutuhkan hardware yang tinggi, aplikasi ringan dan bisa diakses oleh semua SKPD dengan mudah.

3. E-monev Keuangan dalam Bingkai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat empat hal dalam pelaksanaan e-monev setiap OPD di Kabupaten Karangasem, pertama mendukung upaya pelaksanaan reformasi birokrasi publik di Kabupaten Karangasem. Kedua, dukungan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pelaksanaan *e-monev* merupakan pelaksanaan asas good governance di seluruh SKPD di Kabupaten Karangasem. Ketiga, pelaksanaan e-monev tidak hanya urusan reformasi birokrasi semakin jelas akan tetapi sekaligus mendukung asas Keterbukaan informasi publik dan keempat, pelaksanaan e-monev juga menciptakan perubahan budaya dalam birokrasi, (Wawancara dengan Kepala Baplitbangda Karangasem, 10 Agustus 2018).

Keempat hasil tersebut sebagaimana dijelaskan dalam analisis hasil temuan penelitian berikut ini ;

3.1. Refomasi Birokrasi di sektor Publik

Lompatan terbesar dari upaya reformasi birokrasi melalui pelayanan e-monev. ini mendukung upaya tuntutan besar konsep reformasi birokrasi tentang transparansi. E-monev membuka permainan baru betapa pentingnya transparansi dalam reformasi birokrasi. Melalui e-monev transparansi soal akses publik, tata kelola, transparansi kinerja, dan transparansi keuangan menjadi terang benderang.

Diantara kelebihan-kelebihan setelah pelaksanaan aplikasi E-monev keuangan di Karangasem, aplikasi ini seolah membuktikan semua konsep-konsep reformasi birokrasi seperti transparansi, partisipasi, efektif efisiensi, dan akuntabel, (lihat governance). Dalam sistem informasi sekarang pelayanan e-monev bisa dikatakan sebagai bentuk aplikasi teknologi yang bisa mendorong adanya transparansi. Hal tersebut untuk mendukung tuntutan masyarakat untuk

mendapatkan bagiannya dalam hal mengawasi jalannya penyelenggaraan negara. Konsep ini menjustifikasi bahwa era digital sekarang dengan e-monev, mempermudah transparansi dimana batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala.

Cara ini memunculkan partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah, dengan pengawasan dari masyarakat pemerintah malah merasa terbantu, hal ini menandakan bahwa masyarakat lebih perhatian mengawasi anggaran dan pengeluaran pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan dimensi dan indikator prinsip partisipasi dalam pembangunan reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Prinsip Partisipasi

Dimensi	No.	Indikator
Partisipasi (Participation)	1.	Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
	2.	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
	3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4.	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber : diolah dari Sedarmayanti : 2017)

E-monev yang dimaksud sebagai alat pemerintah dalam Kabupaten untuk mendukung dalam reformasi birokrasi Publik. Hal ini sejalan dengan Djunaedi (2002) birokrasi harus memiliki kebijakan yang jelas, seperti, mengutamakan hasil dan kinerja, desentralisasi serta menciptakan partisipasi dan tim kerja, dan memfungsikan kekuatan proses.

Dalam hal pengutamaan hasil dan kinerja, e-monev di Kabupaten Karangasem sangat jelas sebagaimana dikatakan oleh Kepala Baplitbangda Karangasem dengan E-monev menurutnya OPD bekerja menjadi terukur kerjanya dan dapat merencanakan kemudian mencapai target-target, bulanan, tiga bulanan hingga tahunan, (Wawancara dengan kepala Baplitbangda Karangasem, 5 Agustus 2018).

Sementara pelaksanaan desentralisasi serta menciptakan partisipasi tim kerja, dengan e-monev pemerintah Kabupaten Karangasem, terlihat jelas, melalui Baplitbangda sebagai leading sektor aplikasi ini mendukung bekerjanya pelaksanaan desentralisasi dalam level SKPD seluruh Kabupaten Karangasem, dan mendorong penciptaan partisipasi kerja di seluruh SKPD Kabupaten.

Dalam hal penciptaan fungsi kekuatan proses, e-monev jelas merupakan sebuah proses menuju terciptanya sistem pelaporan keuangan. Aplikasi e-monev untuk mengukur kegiatan belanja langsung dari masing-masing OPD sesuai dengan target yang ada di dalam APBD (Wawancara dengan Kepala Baplitbangda Karangasem, 5 Agustus 2018).

E-monev juga untuk menunjang pelaksanaan dari atau mengawasi pelaksanaan dari realisasi anggaran. Jika tidak menggunakan sistem, proses yang akan dilalui lama. Dan untuk mencari hasil dari realisasi akan melewati proses yang panjang kalau tidak melalui sistem. Jadi disamping untuk inovasi dan kreatifitas, juga untuk reformasi birokrasi di sektor publik, karena di sistem ini kegiatan terawasi dan termonitor (Wawancara dengan kepala Baplitbangda Karangasem, 5 Agustus 2018).

3.2 Pelaksanaan asas good governance

Tidak dapat dimungkiri bahwa e-monev merupakan jembatan antara reformasi birokrasi dengan pelaksanaan asas good governance. Terdapat kesamaan pemahaman antara tuntutan *good governance* dan tuntutan Reformasi Birokrasi, keduanya dijembatani oleh prinsip-prinsip yang terkait dalam konsep *good governance*. Dengan meminjam istilah Sedarmayanti (2009:67) reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Secara bersamaan keduanya juga merupakan tuntutan dalam pelaksanaan demokratisasi dalam era reformasi saat ini. Upaya kearah receiptanya tata kelola pemerintahan (*governance*) dapat diukur seberapa banyak transparansi pemerintah yang lakukan dalam aplikasi e-monev.

Menurut Rosidi (2013: 20-22), terdapat beberapa prinsip-prinsip umum dalam *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Konsep lain yang menjadi turunan dari konsep umum tersebut misalnya, representasi, equity, efektifitas, efisiensi, daya tanggap, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Transparansi merupakan tuntutan yang menjadi tujuan dilaksanakan aplikasi e-monev.

Dalam konteks pelaksanaan aplikasi e-monev di masing-masing OPD Kabupaten Karangasem, e-monev menjadi ujung tombak dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Roh *good governance* dalam e-monev menjadi ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan seiring dengan bekerjanya rejim demokrasi sekarang konsep-konsep ini menjadi mantra untuk menentukan baik tidaknya pelaksanaan sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh suatu entitas politik yang disebut negara.

Dalam pendapatnya yang sama Djunaidi (2002), dalam hal reformasi birokrasi harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat mendukung terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*good governance*), terkait hal tersebut menurut Djunaidi reformasi birokrasi memiliki indikator sebagaimana dalam konsep *good governance* yaitu: pertama, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kewajiban birokrasi untuk memberikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja serta memberikan tindakan seseorang atau pimpinan unit kerja kepada pihak yang memiliki wewenang menurut pertanggung jawaban (politik, keuangan dan hukum). Kedua, tansparansi, yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan pertanggungjawaban dari pemerintah, organisasi atau badan usaha. Ketiga, keterbukaan yaitu memberikan informasi secara terbuka dan menerima kritik yang bersifat membangun atau memperbaiki. Keempat, aturan hukum yaitu semua keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi atau badan usaha harus berdasarkan hukum dan peraturan yang sah.

Kelima, keadilan yaitu perlakuan yang adil kepada semua pihak. Kelima, partisipasi yaitu adanya kehendak dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. Indikator Prinsip Akuntabilitas

Dimensi	No.	Indikator
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	1.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
	2.	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
	3.	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
	4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
	5.	Berkurangnya kasus-kasus KKN

Sumber: diolah Sedarmayanti (2007:23)

3.3. Perubahan Budaya Kerja Birokrasi

Reformasi Birokrasi dengan e-monev bisa menyebabkan perubahan budaya kerja dalam lingkungan instansi pemerintahan. Banyak hal yang membuat birokrasi efektif, dan efisien dengan pelaksanaan e-monev. Dalam pendayagunaan aparatur sipil negara misalnya, pemerintah Kabupaten Karangasem dengan e-monev sumberdaya lain (personil) bisa dimanfaatkan atau dilimpahkan untuk mengambil alih pekerjaan lain. Tidak perlu lagi mengirim banyak orang ke Baplitbangda untuk melaporkan realisasi anggaran dari kegiatan yang telah dilakukan (Wawancara dengan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi 6 Agustus 2018).

Dengan penciptaan inovasi elektronik pemerintahan (e-monev) perubahan budaya sebagaimana layaknya perubahan zaman yang menuntut pemerintah daerah harus efektif dan kreatifitas dalam hal pelayanan publik.

Dalam hal inilah kehadiran elektronik-monitoring dan evaluasi (e-monev) di Kabupaten Karangasem berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan data informasi yang cepat dan akurat khususnya dalam hal membantu proses laporan dan pemantauan capaian hasil pembangunan dan realisasi anggaran. Di bawah koordinasi BapLitbangda, sistem e-monev terkoneksi ke semua OPD dan secretariat melalui perangkat computer yang telah dipersiapkan di masing-masing OPD.

Pelaksanaan aplikasi ini menjadi semakin lebih bermakna ketika keikutsertaan masyarakat dalam memonitor langsung kinerja pemerintahan, mendorong terjadinya perubahan besar budaya kerja dalam lingkungan instansi pemerintah. Partisipasi masyarakat mendorong terjadinya perubahan budaya kerja ini dapat dirasakan pada responsitas pelayanan yang dilakukan oleh Birokrasi pemerintah pada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan semangat prinsip-prinsip good governance sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Konsep Variabel, Indikator dan Sub Indikator pelaksanaan asas Good Governance.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas	Efektivitas kerja	Kesiagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bersedia menyelesaikan tugas khusus yang bersifat spontan
		Kemangkiran	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pekerja yang bolos saat jam kerja • Tidak mengerjakan pekerjaan tepat waktu
		Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> • adanya semangat kerja • rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan
		Kepuasan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • adanya perasaan puas tentang hasil yang dicapai • adanya penghargaan untuk mencapai kepuasan kerja
		Beban pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • beban pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan individu • beban pekerjaan yang sesuai dengan jumlah kelompok
		Waktu menyelesaikan tugas	<ul style="list-style-type: none"> • tepat waktu • sesuai target kerja

3.4 Keterbukaan informasi publik

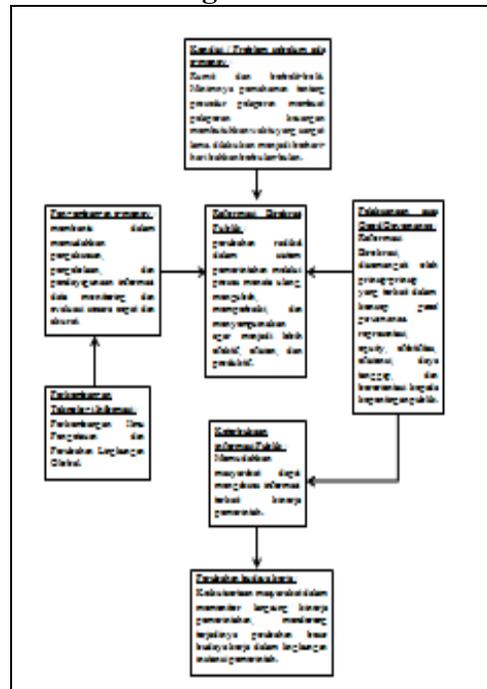
E-monev dalam kerangka reformasi Birokrasi tidak hanya membuktikan bekerjanya konsep-konsep good governance, akan tetapi e-monev juga memasukan desakan baru tentang keterbukaan informasi publik. Jembatan untuk menuju kearah sana adalah transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah tranparansi informasi publik. Dengan e-monev, (transparansi informasi publik) membuka seluruh informasi ke publik, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga pelaksanaannya.

Kedua, keterbukaan informasi publik, memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait kinerja pemerintah (Wawancara kepala dinas catatan Sipil dan kependudukan 5 Agustus 2018).. Dengan e-monev, pemerintah Kabupaten Karangasen dapat melaporkan seberapa besar progress-nya (realisasi anggaran) secara fisik yang telah dilakukan. Dengan e-monev dapat menjelaskan seberapa besar kegiatan fisik di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan.

Laporan tersebut diinput ke aplikasi e-monev, mulai dari bulanan, triwulan sampai tahunan dengan angka presentasinya semuanya akan kelihatan dalam e-monev masing-masing OPD (Wawancara Sri Aryani Ka sunprog Pengendalian pembangunan Setda 30 Juli 2018). Laporan kemajuan tersebut langsung terpublikasi sehingga memudahkan masyarakat mengetahui kinerja pemerintah, di masing-masing OPD.

Baplitbangda sebagai leading sektor pelaksanaan e-monev memanfaatkan seluruh perencanaan yang disusun dari masing-masing SKPD melalui musrenbangda. Di bawah koordinasi BappedaLitbang, sistem e-monev terkoneksi ke semua OPD dan sekretariat melalui perangkat computer yang telah dipersiapkan di masing-masing OPD.

Bagan/alur E-money Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi



4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut, pertama Reformasi birokrasi melalui e-monev, bukan untuk melakukan upaya reformasi birokrasi dalam pemahaman memperpendek dan mengurangi jalur birokrasi yang terjadi, akan tetapi untuk menunjang jumlah personil yang sedikit. Kedua, dalam pendayagunaan aparatur, dengan e-monev sumberdaya lain (personil) bisa dimanfaatkan atau dilimpahkan untuk mengambil alih pekerjaan lain. Ketiga, reformasi birokrasi yang hanya membuktikan konsep-konsep reformasi birokrasi seperti efektif efisiensi, akuntable, dll (lihat governance). Akan tetapi reformasi ini memasukan desakan baru tentang keterbukaan informasi publik. Keempat, E-monev mendukung program reformasi birokrasi dalam pemerintahan elektronik. Kelima, laporan tidak menungu lagi fisik, akan tetapi sementara bisa menggunakan pelaporan yang keluar dari sistem. Misalnya, harus menunggu bukti fisik dari lembaga/kementrian secara tertulis, akan tetapi bisa menggunakan output dari sistem. Keenam,

masyarakat bisa mengakses kapan, dan dimana pun informasi terkait kinerja pada setiap OPD/SKPD yang ada di seluruh Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang diajukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Karangasem antara lain sebagai berikut, pertama, sebaiknya pemerintah daerah (SKPD/OPD) Kabupaten Karangasem melihat pelaksanaan e-monev ini dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi ciri khas dari masing-masing SKPD/OPD. Kedua, Baplitbangda dalam hal ini sebagai *leading sector* e-monev ini sebaiknya mengintegrasikan aplikasi ini dengan sistem-sistem lain sehingga tidak terlalu banyak berserakan sistem aplikasi seperti yang ada saat ini. Saat ini di baik di lingkup pemerintah kabupaten maupun Baplitbangda sendiri masih terlalu banyak sistem aplikasi yang belum terintegrasi menjadi satu kesatuan aplikasi sehingga menghambat kinerja birokrasi pemerintahan.

5. REFERENCES

- Djunaedi, Achmad, 2003, Beberapa Pemikiran Penerapan e-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional E- Government dan Workshop Linux, 30 Oktober 2002, FMIPAUGM, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- _____ (2015). *Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar*. Second edition. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Lawal, Tolu dan Abegunde Oladunjo (2010). “*Local Government Corruption and Democracy in Nigeria*” dalam *Journal of Sustainable Development in Africa*. Volume 12 nomor 5.
- May, Peter J dan Soran C. Winters (2007). “*Politician, Manager and Street-Level Bureaucrats: Influences On Policy Implementation*” dalam *Journal Of Public Administration Research*.
- Prasojo, Eko, 2003, Agenda Politik dan pemerintah di Indonesia : Desentralisasi Politik, Reformasi Birokrasi dan Good Governance
- Rewansyah, Asmawi (2009). *Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance*. Tanpa nama Penerbit
- Syakdiah. (2009). *Kualitas Pelayanan Publik dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Suatu Penelitian tentang pelayanan sertifikat tanah Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta)*. Laporan Penelitian. LPPM UWMY

Toha, Miftah, 2004, Visi dan Strategi Politik dan Pemerintahan, Tantangan dan Kebijakan Membangun Tata Pemerintahan Yang Amanah, makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus Untuk Masa Depan Indonesia, 20-22 Mei 2004, Forum Rektor UGM, Yogyakarta.